BAB III

PERCERAIAN DENGAN SYARAT PIHAK PEREMPUAN HARUS MENGEMBALIKAN SESERAHAN ADAT DALAM PUTUSAN NOMOR : 012/Pdt.G/2012/PA.Rtg

A. Profil Pengadilan Agama Ruteng

1. Letak Geografis dan Wilayah Kewenangan Pengadilan Agama Ruteng

Pengadilan Agama Ruteng adalah suatu Pengadilan tingkat pertama yang secara organisasi atau struktur dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang mana Pengadilan Agama tersebut menangani masalah hukum perdata bagi orang islam di Kabupaten Manggarai Sesuai dengan keberadaannya, maka Pengadilan Agama ini harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum Islam terutama mengenai masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah.

Pengadilan Agama Ruteng Kelas I berkedudukan di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan terletak di jalan Adisucipto Ruteng, kode pos 86518 Telepon (0385) 21436 Fax (0385) 22913. Pengadilan Agama Ruteng Ibukota Kabupaten Manggarai yang wilayahnya meliputi Kabupaten Manggarai Timur dan Manggarai Barat tempatnya berada di Pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas¹ sebagai berikut: a) Sebelah Timur perbatasan dengan Kabupaten Ngada (Wilayah PA Bajawa). b) Sebelah Barat perbatasan dengan Kabupaten

¹ Data diambil dari arsip Pengadilan Agama Ruteng, 1 Januari 2013.

Manggarai Barat (sebelum terbit Keppres Nomor 3 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 termasuk dalam yurisdiksi PA Ruteng, namun saat ini termasuk dalam yurisdiksi PA Labuan Bajo. c) Sebelah Utara perbatasan dengan Laut Flores. d) Sebelah Selatan perbatasan dengan Laut Sawu.

Pengadilan Agama Ruteng adalah peradilan Islam Indonesia. dari segi kewenangan perkara, perkara yang diadili adalah jenis perkara perdata menurut Agama Islam, serta dalam pelaksanaannya memekai ajaran Islam. Dengan demikian Pengadilan Agama Ruteng merupakan salah satu produk Peradilan Negara Indonesia yang bersifat peradilan khusus yang berwenang dalam jenis perkara perdata tertentu yakni perkara perdata Islam yang diatur dalam undang-undang. Wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng meliputi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Manggarai (beribu kota Ruteng) dan Kabupaten Manggarai Timur (beribu kota Borong) yang dibagi atas beberapa Kecamatan, yaitu sebagai berikut : 1) Kabupaten Manggarai (beribu kota Ruteng) terdiri dari 6 Kecamatan yaitu : a) Kecamatan Ruteng terdiri dari 23 desa. b) Kecamatan Satar Mese terdiri dari 37 desa. c) Kecamatan Wae Rii terdiri dari 17 desa. d) Kecamatan Reok terdiri dari 20 desa. e) Kecamatan Cibal terdiri dari 27 desa. f) Kecamatan Langke Rembong terdiri dari 11 desa. 2) Kabupaten Manggarai Timur (beribu kota Borong) terdiri dari 6 Kecamatan² yaitu : a) Kecamatan Borong terdiri dari 21 desa. b) Kecamatan Poco Ranaka terdiri dari 28

² Ibid. , 1 Januari 2013.

desa. c) Kecamatan Kota Komba terdiri dari 17 desa. d) Kecamatan Lamba Leda terdiri dari 16 desa. e) Kecamatan Elar terdiri dari 21 desa. f) Kecamatan Sambi Rampas terdiri dari 11 desa.

2. Wewenang Pengadilan Agama Ruteng

Pengadilan Agama Ruteng merupakan satu instansi pemerintahan dibawah naungan Mahkamah Agung, dibidang teknik fungsional menangani hukum perdata seperti Pengadilan Agama lainnya. Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ruteng sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diamandemen ke dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diamandemen dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yaitu sebagai berikut : 1) Waris. 2) wasiat. 3) Hibah. 4) wakaf. 5) Shadaqah. 6) Ekonomi. 7) Perkawinan yaitu : a) Izin poligami. b) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). c) Cerai talak. d) Cerai gugat. e) Harta bersama. f) Kelalaian atas kewajiban suami istri. g) Penguasaan anak. h) Nafkah anak. i) Hak-hak mantan istri. j) Pengesahan anak. k) Pencabutan kekuasaan anak. l) Penunjukan orang lain sebagai wali. m) Ganti rugi terhadap wali. n) Asal usul anak. m) Penolakan kawin campuran. o) Isbat nikah. p) Dispensasi kawin. q) Wali adhol.³

³ Data diambil dari arsip Pengadilan Agama Ruteng, 1 Januari 2013.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ruteng

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, amandemen Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, amandemen Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa susunan peradilan agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Selanjutnya dalam pasal 26 dan pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian sehingga kelancaran dari proses pelaksanaan sistem peradilan tidak akan menemui hambatan. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Ruteng kelas 1 adalah sebagai⁴ berikut : 1) Ketua (Drs. Irwandi, M.H). 2) Wakil Ketua (Drs. H. Rakhmat Hidayat, H.S, S.H, M.H). 3) Hakim (Zainul Arifin, S.Ag), (M. Syauky S. Dasy, S.Hi), (Andri Yanti, S.Hi), (Rajiman, S.Hi), (Aris Habibuddin Syah, S.Hi). 4) Panitra / Sekretaris (Insani Miratillah Indah Sela, S.Ag), ada dua yaitu : 1) Wakil panitra (tidak ada), ada tiga yaitu : a) Panitra muda permohonan (tidak ada). b) Panitra muda gugatan (tidak ada). c) Panitra muda (tidak ada), ada satu yaitu : Staff (M. Mustalqiran, S.Hi). 2) Wakil sekretaris (Sarui, S.Ag) ada tiga yaitu : a) Kepala urusan kepegawaian (Siti

⁴ Ibid. , 1 Januari 2013.

Hamila). b) Kepala urusan umum (tidak ada), ada satu yaitu : (1) Staff (Irwan Setiawan). C) Kaur umum keuangan (M. Tohir Guhir,S.H), ada satu yaitu : (2) Staff (Akhmad Suadi, S.H), 4) Panitera / Sekretaris (Insani Miratillah Indah Sela, S.Ag), ada tiga yaitu : a) Panitera pengganti (Insani Miratillah I, S.Ag), (Akhmad Suadi, S.H), (M. Tohir Guhir, S.H), b) Juru sita pengganti (Sarui, S.Ag), (Siti Hamilah). C) Juru sita (tidak ada).⁵

B. Putusan Perceraian Dengan Syarat Pihak Perempuan Harus Mengembalikan Seseheraan Adat di Pengadilan Ruteng

1. Diskripsi Singkat Perkara

Pemeriksa Pengadilan Agama Ruteng yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang telah menjatuhkan putusan dalam perkara *isbat* Nikah dalam perceraian yang diajukan oleh : Pemohon umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir sekolah menengah pertama (SMP), pekerjaan petani,tempat tinggal di RT. 01 RW. 01, Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Melawan termohon Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pekerjaan Petani,Tempat Tinggal di RT. 001 RW. 001, Desa Biting, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Termohon umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah menengah pertama (SMP) , pekerjaan petani,

⁵ Data diambil dari arsip Pengadilan Agama Ruteng, 1 Januari 2013.

tempat tinggal di RT.001 RW. 001, Desa Biting, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur.⁶

2. Duduk perkara (posita)

Pemohon dalam surat Termohonnya tertanggal 30 juli 2012 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng, Nomor : 012/Pdt.G/2012/PA.Rtg, tanggal 30 juli 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut : bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara syariat Islam di rumah orang tua Termohon, di Desa Longko Welu, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 05 Juni 2006, yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon bernama : ABDUL DAMPU, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama : Saksi satu HAMSAN SUDIN dan Saksi dua ABDURRAHMAN. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun, dan Termohon berstatus jejaka dalam usia 20 tahun.

Antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk

⁶ Kutipan Putusan PA Ruteng Nomor 012/Pdt.G/2012/PA.Rtg, 1.

melangsungkan perkawinan,⁷ baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di rumah Termohon selama 2 tahun.

Selama perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : RIFKI EGANTARA, Laki-laki, umur 5 tahun, dan saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon. Perkawinan tersebut berjalan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam.⁸

Sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak memiliki Akta Nikah, karena perkawinan Pemohon dan Termohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar dengan alasan ketika Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan, orang tua Pemohon sebenarnya tidak memberikan restu dikarenakan masih menginginkan agar Pemohon meneruskan sekolahnya terlebih dahulu, selain itu orang tua Pemohon merasa malu dikarenakan sudah beberapa kali Pemohon dibawa lari oleh Termohon. Oleh karenanya agar perkawinan Pemohon dan Termohon tidak diketahui khalayak banyak, maka perkawinan Pemohon dan Termohon dilakukan tidak dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum

⁷ Ibid. , 2.

⁸ Ibid. , 2.

dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dan Termohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah terlebih dahulu.

Kurang lebih sejak bulan November 2006 ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan⁹ antara lain: a) Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. b) Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena cemburu. c) Bahwa Termohon sering memukul Pemohon, terutama ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2008, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak pernah ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon dan anaknya.

Terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pernah diusahakan upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun pihak lain, namun tidak berhasil. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma

⁹ Kutipan Putusan PA Ruteng Nomor 012/Pdt.G/2012/PA.Rtg, 2.

hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.¹⁰

Pemohon termasuk orang miskin atau tidak mampu, sehingga Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara. Oleh karenanya Pemohon agar dapat diizinkan berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma). Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dari salah satu Hakim Anggota Majelis yaitu ARIS HABIBUDDIN SYAH,S.HI, namun sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 17 September 2012 upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil.¹¹

Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang mengakui dan membenarkan seluruh alasan gugatan Pemohon dalam penjelasan di bawah ini : Bahwa Termohon menyatakan yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon sering pulang ke kampungnya untuk menjenguk orang tuanya tanpa seizin Termohon dan Pemohon pulang seorang diri tanpa ditemani pihak keluarga, dan hal inilah yang menyebabkan Termohon cemburu.

¹⁰ Ibid. , 2.

¹¹ Kutipan Putusan PA Ruteng Nomor 012/Pdt.G/2012/PA.Rtg, 3.

Termohon membenarkan jika dirinya pernah memukul (menampar) Pemohon, hal itu disebabkan kekecewaan Termohon terhadap Pemohon ketika Termohon pulang dari kerja dalam kondisi perut lapar ternyata di rumah tidak ada makanan yang bisa dimakan, dan pada saat itu Pemohon malah sedang asik duduk-duduk di rumah tetangga. Itulah yang menyebabkan Termohon marah besar dan akhirnya menampar pipi Pemohon.¹²

Termohon menyatakan tidak benar, jika sejak berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon. Termohon pernah beberapa kali memberikan uang dan pakaian kepada anak Pemohon dan Termohon diantaranya : *Pertama*. Pada tahun 2009 Termohon pernah memberikan uang kepada anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 20.000,- dan 1 stell. *Kedua*. Pada tahun 2010 Termohon pernah memberikan uang kepada anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 20.000. *Ketiga*. Pada pertengahan tahun 2011 Termohon juga pernah memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- kepada anak Pemohon dan Termohon dan 1 ekor kambing betina kepada keluarga Pemohon yang pada saat itu sedang menyelenggarakan acara peringatan atas meninggalnya Ibu Pemohon. *dan Keempat*. Sekitar bulan Juni 2012 kemarin Termohon menitipkan uang melalui bapak Pemohon untuk diberikan kepada anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 20.000. Bahwa Termohon membenarkan pernah beberapa kali diupayakan damai atas pertengkaran yang telah terjadi antara Pemohon dan Termohon oleh pihak Keluarga,

¹² Kutipan Putusan PA Ruteng Nomor 012/Pdt.G/2012/PA.Rtg, 4.

ketua Adat, Kepala KUA setempat, dan pihak Polsek setempat. Terakhir Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak Kepolisian setempat (dalam hal ini Polsek Elar) pada tahun 2008, ketika itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan tindakan Pemohon yang memecahkan peralatan dapur Termohon. Setelah dilakukan upaya damai di Polsek Elar, Pemohon beserta ayahnya sempat menyatakan jika telah terjadi kesepakatan untuk terjadinya perdamaian antara kedua belah pihak, maka Termohon harus menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- dan 1 ekor kuda kepada keluarga Termohon, padahal sebenarnya tidak ada kesepakatan yang berbunyi seperti itu ketika dilakukan upaya damai di kantor Polsek. Namun demikian Termohon yang punya itikad baik akhirnya tetap memberikan apa yang diminta keluarga Pemohon dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- sebagai pengganti harga 1 ekor kuda, akan tetapi pihak keluarga Termohon tidak menerimanya sehingga perdamaian pun urung terjadi. Akhirnya oleh ketua adat setempat pihak Pemohon dan Termohon didamaikan lagi dengan adanya sebuah kesepakatan Termohon harus menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- dan 1 ekor kambing kepada keluarga Pemohon. Keesokan harinya Termohon beserta keluarga mengantarkan denda dimaksud namun orang tua Pemohon tetap tidak mau menerimanya, sehingga upaya damai pun tetap tidak berhasil. Atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan¹³ sebagai berikut : Bahwa Pemohon menyatakan tidak pernah pergi

¹³ Kutipan Putusan PA Ruteng Nomor 012/Pdt.G/2012/PA.Rtg, 5.

keluar rumah tanpa seizin Termohon. Andai Pemohon pergi keluar rumah sendiri tentunya Pemohon lakukan atas seizin Termohon. Bahwa selain ditampar, pipi Pemohon juga pernah disulut rokok oleh Termohon, pada saat itu Pemohon dalam keadaan menyusui anaknya.

Rasa cemburu Termohon muncul disebabkan sifat Termohon sendiri yang pemalas. Beberapa kali Pemohon mengajak Termohon pergi ke kebun namun Termohon tidak mau, sehingga Pemohon pergi ke kebun bersama para tetangga yang sebagian diantaranya ada yang laki-laki. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut : a) Mengabulkan gugatan Pemohon. b) Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juni 2006, di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar. c) Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Termohon terhadap Pemohon. d) Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.¹⁴

3. Putusan Majelis Hakim

Pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian. Dalam sidang ini Pemohon mengajukan beberapa alat bukti, berupa : Foto kopi Surat Keterangan Penduduk Pemohon Nomor : Pem.Des.145/39/VII/2012 tertanggal 25 Juli 2012 yang

¹⁴ Kutipan Putusan PA Ruteng Nomor 012/Pdt.G/2012/PA.Rtg, 6.

dikeluarkan oleh Kepala Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode dan selanjutnya disebut bukti (P.2).

Bukti surat (P.2) tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng. Bahwa terhadap bukti surat/tertulis (P.2) tersebut, Termohon membenarkannya dan tidak keberatan bukti tersebut dijadikan alat bukti dalam perkara ini. Selain alat bukti surat, alat bukti selanjutnya adalah alat bukti saksi, yaitu : ABDUL DAMPU Bin GANI, umur 57 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001, Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, dibawah sumpahnya mengaku sebagai ayah Pemohon, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Saksi lupa kapan waktu tepatnya Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, namun demikian saksi mengaku jika dialah yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon dan Termohon.¹⁵

Saksi lupa mahar yang perna diberikan Termohon kepada Pemohon ketika keduanya melangsungkan pernikahan, namun saksi masih ingat bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah bapak HAMSAH SUDIN dan bapak ABDURRAHMAN. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, dan saat ini Pemohon dan

¹⁵ Kutipan Putusan PA Ruteng Nomor 012/Pdt.G/2012/PA.Rtg, 5.

Termohon telah dikaruniai 1 orang anak Laki-laki bernama RIFKIE GANTARA, umur 5 tahun, yang saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon.¹⁶

Awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak anak Pemohon dan Termohon lahir rumah tangganya mulai goyah. Sebanyak 4 kali Pemohon kabur dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi, ketika saksi tanya alasan kaburnya, Pemohon menyatakan jika dirinya telah bertengkar dengan Termohon dan dipukul oleh Termohon, bahkan pernah saksi melihat bekas luka sulutan rokok di pipi kanan Pemohon.

Saksi berulang kali mengantarkan Pemohon kembali pulang ke rumah kediaman bersama, namun untuk kaburnya Pemohon yang keempat kalinya saksi tidak mengantar kembali dikarenakan Pemohon mengancam akan bunuh diri jika diantar kembali ke rumah kediaman bersama, kejadian terakhir terjadi pada awal 2008, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Kaburnya Pemohon dari satu waktu ke waktu berikutnya berselang beberapa minggu hingga beberapa bulan, dan biasanya Pemohon tinggal di rumah saksi ketika kabur dari rumah kediaman bersama hanya selama 2 sampai 3 hari. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi antara akhir tahun 2006 hingga awal tahun 2008.

Saksi mengetahui dari keterangan Pemohon jika yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah rasa cemburu yang muncul dari

¹⁶ Ibid. , 5.

dalam diri Termohon, dan semua kejadian pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi di rumah kediaman bersama, yaitu di rumah Termohon.¹⁷ Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Termohon hanya 2 kali memberi nafkah, itupun hanya diberikan kepada anak Pemohon yang pertama. Termohon memberikan pakaian 1 stel dan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.

Beberapa kali telah diupayakan damai terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh saya, pihak keluarga yang lain, kepala KUA setempat pada tahun 2008, dan pihak Kepolisian setempat pada tahun 2009. Namun semua upaya damai tersebut tidak membuahkan hasil. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ruteng. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya. Menyatakan *Belis* (pemberian mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita saat pernikahan sesuai adat Manggarai) berupa : 1) 1 (satu) ekor kerbau jantan, 2) 1(satu) ekor kuda jantan, 3) Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah benar adanya.¹⁸

Menghukum Termohon mengembalikan *Belis* tersebut kepada Pemohon berupa : 1) 1(satu) ekor kerbau jantan, 2) 1 (satu) ekor kuda jantan, 3) Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Membebaskan kepada Termohon membayar

¹⁷ Kutipan Putusan PA Ruteng Nomor 012/Pdt.G/2012/PA.Rtg, 6.

¹⁸ Aris Habibuddin umur 32 Pegawai Pengadilan Agama *Wawancara* 15 Desember 2012.

seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. HAMADALA Bin ABDUL NGGATUK, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Nunang, Desa Biting, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Selanjutnya saksi Termohon memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa saksi adalah paman Pemohon, yakni saksi bersaudara kandung dengan ayah Pemohon.

Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2006 tetapi saksi lupa tanggal dan bulan perkawinannya. Bahwa pada waktu Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon membawa *Belis* berupa : (1). 1 (satu) ekor kerbau jantan, (2). 1 (satu) ekor kuda jantan, dan (3). Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Bahwa hal itu saksi ketahui karena saksi ikut menyerahkan *Belis* tersebut kepada keluarga pihak perempuan.

Selain apa yang saksi terangkan tersebut di atas, saksi tidak mempunyai keterangan lain lagi. Bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon membenarkannya. Bahwa selanjutnya baik Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan memiliki keinginan yang kuat untuk bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan, sedangkan Termohon berkesimpulan tetap pada pendiriannya untuk tidak bercerai dengan Pemohon.¹⁹

¹⁹ Kutipan Putusan PA Ruteng Nomor 012/Pdt.G/2012/PA.Rtg, 5.

C. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian dengan Syarat Pihak Perempuan harus Mengembalikan Seserahan Adat Putusan No.012/Pdt.G/2012/PA.Rtg

Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas :²⁰ bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan. Bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) berupa Akta Autentik telah terbukti bahwa Pemohon termasuk golongan orang tidak mampu. (vide : Pasal 60B ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Berdasarkan bukti (P.2) terbukti bahwa Pemohon adalah warga Lawi RT. 01 RW.01, Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, yang dalam hal ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng, sehingga sesuai Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak turut diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Ruteng berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. (kewenangan relatif).

Pemohon beralasan jika antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 5 Juni 2006 namun

²⁰ Kutipan Putusan PA Ruteng Nomor 012/Pdt.G/2012/PA.Rtg, 8.

pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA setempat dikarenakan suatu alasan sebagaimana diutarakan Pemohon dalam gugatannya. Bahwa alasan Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah dibenarkan dan diakui oleh Termohon.²¹ Dan berdasarkan bukti pengakuan Termohon terungkap hal-hal sebagai berikut : 1) Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 5 Juni 2006 yang dilangsungkan di rumah orang tua Termohon. 2) Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon bernama ABDUL DAMPU dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- serta disaksikan oleh HAMSAH SUDIN dan ABDURRAHMAN. 3) Bahwa akad nikah dilangsungkan tanpa berselang waktu. Antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan. 4) Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dan Termohon, tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan keduanya, serta hingga saat ini keduanya masih beragama Islam.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan dalam bab IV jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum primer Nomor 2 cukup beralasan untuk dikabulkan.²²

²¹ Ibid. , 8.

²² Kutipan Putusan PA Ruteng Nomor 012/Pdt.G/2012/PA.Rtg, 9.

Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidak ikut dirubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 130 R.Bg jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di tiap persidangan, namun tidak berhasil.

Alasan atau dalil pokok gugatan Pemohon yang berkaitan dengan perceraian adalah sebagai berikut : 1) Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. 2) Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena cemburu. 3) Bahwa Termohon sering memukul Pemohon, terutama ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. 4) Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2008 sampai sekarang ini.²³

Alasan-alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

²³ Ibid. , 9.

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Pemohon telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

pokok masalah dalam perkara ini adalah : 1) Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon suka cemburu?. 2) Apakah benar Termohon sering memukul Pemohon ?. 3) Apakah benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2008 sampai sekarang ini ?.

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang telah dipertimbangkan di atas. Selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Majelis Hakim tetap memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak turut diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁴

²⁴ Kutipan Putusan PA Ruteng Nomor 012/Pdt.G/2012/PA.Rtg, 10.

Pemohon telah menghadirkan 1 orang saksi di muka persidangan bernama ABDUL DAMPU Bin GANI yang merupakan Ayah Kandung Pemohon. Dengan demikian saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas. Saksi tersebut di dalam persidangan dibawah sumpahnya juga telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas yang ternyata saling bersesuaian dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon di muka persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Pemohon hanya menghadirkan seorang saksi, maka atas perintah Ketua Majelis sebagaimana ketentuan pasal 183 R.Bg, Pemohon telah mengucapkan sumpah supletoir (sumpah pemutus) yang menyatakan bahwa segala yang telah diuraikan dalam surat gugatan berikut penjelasannya adalah benar. Berdasarkan bukti berupa keterangan dibawah sumpah dari saksi Pemohon ditambah dengan sumpah supletoir (sumpah pemutus) yang diucapkan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan dan berkesimpulan pada pokoknya bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2006 hingga awal tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Pemohon berulang kali kabur dari rumah kediaman bersama, dan sejak akhir tahun 2008 itulah antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggalnya.²⁵

²⁵ Ibid., 10.

Pokok masalah dalam perkara Pemohon ini adalah apakah Peradilan Agama secara absolute berwenang mengadili sengketa belanja perkawinan ?. Atas bantahan dan Pemohon yang diajukannya, Pemohon telah mengajukan 1 orang saksi bernama HAMADALABin ABDUL NGGATUK, yang merupakan paman dari Pemohon, dimana saksi tersebut memberikan keterangan yang memperkuat apa yang telah didalilkan oleh Pemohon.

Berdasarkan bukti berupa keterangan dibawah sumpah dari saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan dan berkesimpulan pada pokoknya memang benar telah ada pemberian “*Belis*” berupa 1 ekor kerbau jantan, 1 ekor kuda jantan, dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- pemberian Termohon kepada keluarga Pemohon saat hendak melangsungkan perkawinan.

Apa yang digugat oleh Termohon termasuk dalam ranah hukum adat dan bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak turut diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), oleh karenanya Pemohon yang diajukan itu dinyatakan ditolak.²⁶

Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa belanja perkawinan yang menurut adat setempat disebut dengan *Belis*, bukanlah kewenangan Peradilan

²⁶ Kutipan Putusan PA Ruteng Nomor 012/Pdt.G/2012/PA.Rtg, 11.

Agama untuk mengadili perkara tersebut. Oleh karena usaha-usaha untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Termohon dan Pemohon tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki²⁷ oleh Al-Qur'an surat Al-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²⁸

²⁷ Ibid. , 11.

²⁸ Departemen Agama RI *Al-Quran Terjemah Indonesia* Jakarta 1988, 796.

Menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *“Menolak kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemashlahatan”*²⁹

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim patut menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa dari Termohon terhadap Pemohon (vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam).

Ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak turut diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, agar terdapat kesamaan data antara Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat

²⁹ Rachmat Syafe'i *Ilmu Usul Fiqih* (CV. Pustaka Setia : Bandung, 1999), 290.

kediaman Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Pemohon telah diizinkan beracara secara cuma-cuma (vide : Putusan Sela Nomor 012/Pdt.G/2012/PA.Rtg tanggal 17 September 2012 Maschi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'dah 1433 Hijriyah), maka sebagaimana maksud Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng dan kepada Pemohon/Termohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini.³⁰

³⁰ Kutipan Putusan PA Ruteng Nomor 012/Pdt.G/2012/PA.Rtg, 12.